MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENGARUH LOVE OF MONEY, RELIGIUSITAS, DAN GENDER TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK ORANG PRIBADI

Hilya Diniah Heidiyanti[1], Khesya Aprilia[2], Sri Suheryanti[3], Indri Kharisma S.E., M.M[4]
Universitas Pamulang, Banten, Indonesia
hilyadiniahheidiyanti@gmail.com khesyaaprilia04@gmail.com *suheryantisri@gmail.com*
dosen02474@unpam.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the influence of love of money, religiosity, and gender on tax evasion ethics among individual taxpayers. The issue of tax evasion has become increasingly important to examine due to the persistently high level of taxpayer non-compliance despite various tax reform efforts undertaken by the government. The love of money variable is used to assess the extent to which an individual's orientation toward money may affect their tendency to justify tax evasion. Religiosity is measured to determine the role of moral values and beliefs in shaping tax ethics, while gender is analyzed as a differentiating factor in ethical decision-making. This research employs a quantitative approach by distributing questionnaires to individual taxpayer respondents. The data were analyzed using multiple linear regression. The findings indicate that love of money has a positive effect on the tendency to justify tax evasion, whereas religiosity has a negative and significant effect on tax evasion ethics. Meanwhile, gender does not have a significant effect in distinguishing ethical perceptions related to tax evasion. These results emphasize that internal factors—such as moral values and orientation toward money—are more dominant in shaping tax ethics than demographic factors.

Keywords: love of money, religiosity, tax evasion ethics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh love of money, religiusitas, dan gender terhadap etika penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Isu mengenai penggelapan pajak semakin penting dikaji karena masih tingginya ketidakpatuhan wajib pajak meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya reformasi perpajakan. Variabel love of money digunakan untuk melihat sejauh mana orientasi seseorang terhadap uang dapat memengaruhi kecenderungan membenarkan tindakan penggelapan pajak. Religiusitas diukur untuk mengetahui peran nilai moral dan kepercayaan dalam membentuk etika perpajakan, sedangkan gender dianalisis sebagai faktor pembeda dalam pengambilan keputusan etis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada responden Wajib Pajak Orang Pribadi. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa love of money berpengaruh positif terhadap kecenderungan membenarkan penggelapan pajak, sedangkan religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Sementara itu, gender tidak berpengaruh signifikan dalam membedakan persepsi etika terkait penggelapan pajak. Temuan ini menegaskan bahwa faktor internal berupa nilai moral dan orientasi terhadap uang lebih dominan dalam membentuk etika perpajakan dibanding faktor demografis.

Kata Kunci: ***love of money, religiusitas, etika penggelapan pajak***.

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 80
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

1. Pendahuluan

Penggelapan pajak merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan pajak yang masih sering terjadi di Indonesia dan berdampak langsung pada menurunnya penerimaan negara. Berbagai upaya reformasi perpajakan telah dilakukan pemerintah, seperti modernisasi administrasi, peningkatan pelayanan, serta edukasi berkelanjutan, namun pelanggaran fiskal tetap muncul karena dipengaruhi oleh faktor psikologis, moralitas, dan karakter individu. Dalam konteks wajib pajak orang pribadi, keputusan untuk mematuhi atau mengabaikan kewajiban perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman pajak, tetapi juga nilai-nilai pribadi seperti orientasi terhadap uang, tingkat religiusitas, serta perbedaan karakter berdasarkan gender. Love of money menggambarkan sejauh mana seseorang menempatkan uang sebagai tujuan utama dalam hidupnya, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin besar orientasi seseorang terhadap uang, semakin besar kecenderungan membenarkan tindakan tidak etis, termasuk penggelapan pajak.

Di sisi lain, religiusitas dianggap sebagai faktor yang dapat memperkuat nilai moral dan etika sehingga berpotensi menurunkan kecenderungan melakukan tindakan penggelapan pajak. Gender juga sering dikaji karena adanya pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tingkat etika dan persepsi risiko yang berbeda dalam membuat keputusan. Berbagai penelitian terdahulu antara tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan hasil yang beragam, sehingga penting dilakukan penelitian lanjutan untuk memperjelas hubungan antar variabel tersebut, khususnya pada wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh love of money, religiusitas, dan gender terhadap etika penggelapan pajak orang pribadi.

Berdasarkan konteks di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana orientasi terhadap uang (love of money) memengaruhi persepsi etis terkait penghindaran kewajiban pajak individu? Kedua, sejauh mana tingkat keberagamaan seseorang berdampak pada pandangan etisnya terhadap praktik penggelapan pajak pribadi? Ketiga, apakah terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam memandang etika penggelapan pajak? Perumusan pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan kajian empiris.

Sejalan dengan itu, riset ini memiliki tiga tujuan utama: (1) mengevaluasi dampak orientasi terhadap uang pada persepsi etis mengenai penggelapan pajak individu; (2) mengkaji bagaimana tingkat religiusitas memengaruhi pandangan etis terhadap penggelapan pajak pribadi; dan (3) mengidentifikasi ada tidaknya perbedaan berbasis jenis kelamin dalam sikap etis terhadap penggelapan pajak. Penetapan tujuan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai faktor-faktor psikologis internal yang membentuk pertimbangan etis individu dalam ranah perpajakan.

Dari sisi akademis, riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian mengenai tingkah laku wajib pajak dengan menekankan dimensi psikologis dan moralitas, serta menyajikan data empiris mutakhir tentang kaitan antara orientasi uang, tingkat keberagamaan, dan jenis kelamin dengan perilaku penggelapan pajak. Dari sudut pandang aplikatif, temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Ditjen Pajak dalam mengembangkan program sosialisasi yang lebih menekankan dimensi moralitas, integritas, serta prinsip-prinsip etika. Bagi publik dan para pembayar pajak, kajian ini diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman bahwa ketaatan membayar pajak bukan semata-mata persoalan regulasi keuangan negara, melainkan juga manifestasi dari nilai-nilai moral dan kewajiban terhadap masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga penting mengingat perkembangan dinamika perpajakan di Indonesia yang semakin menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penerimaan negara. Di tengah upaya pemerintah memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan, pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendorong perilaku penggelapan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

pajak menjadi semakin relevan. Banyak penelitian sebelumnya menekankan bahwa aspek teknis seperti tarif, sanksi, dan prosedur administrasi bukan satu-satunya determinan kepatuhan pajak. Faktor internal individu, termasuk nilai moral, keyakinan religius, serta orientasi terhadap uang, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara seseorang memandang kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, mengkaji hubungan antara love of money, religiusitas, dan gender dengan etika penggelapan pajak dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana perilaku perpajakan terbentuk dalam konteks sosial budaya Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menjadi relevan sebagai respon terhadap fenomena rendahnya kepatuhan pajak yang masih terjadi hingga saat ini, di mana sebagian wajib pajak masih menganggap penggelapan pajak sebagai tindakan yang wajar atau tidak merugikan. Padahal, penggelapan pajak memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan fiskal dan kualitas layanan publik. Dengan memahami faktor psikologis dan nilai-nilai moral yang memengaruhi keputusan wajib pajak, pemerintah dapat merancang kebijakan edukasi dan komunikasi yang lebih efektif, serta berorientasi pada pembentukan perilaku etis. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, tetapi juga menjadi dasar bagi formula kebijakan yang lebih manusiawi, berbasis nilai, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Love Of Money

Konsep orientasi terhadap uang (love of money) menguraikan bagaimana sikap individu terhadap materi dapat membentuk perilaku etisnya. Individu yang memiliki obsesi tinggi terhadap uang cenderung lebih mudah melegitimasi perbuatan yang bertentangan dengan norma etika, termasuk praktik pengelakan pajak. Wijayanti (2020) mengemukakan bahwa orientasi kuat terhadap uang memiliki dampak positif terhadap penerimaan perilaku penghindaran pajak di kalangan wajib pajak perorangan. Temuan serupa disampaikan oleh Sari dan Putra (2021) yang mengungkapkan bahwa mereka yang memiliki keterikatan emosional tinggi terhadap uang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi pribadi, sehingga memiliki toleransi lebih besar terhadap tindakan yang melanggar etika.

Religiusitas

Religiusitas berperan penting dalam membentuk nilai moral dan perilaku kepatuhan. Rahmawati (2019) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penggelapan pajak, karena individu yang religius memiliki pedoman moral yang kuat. Hasanah dan Kurniawan (2020) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa religiusitas dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui mekanisme internalisasi nilai moral. Selanjutnya, Lestari (2022) menegaskan bahwa semakin tinggi religiusitas seseorang, semakin kuat penolakannya terhadap tindakan penggelapan pajak.

Gender

Gender sering digunakan untuk membedakan sensitivitas etis seseorang. Dalam penelitian Pratiwi (2021) ditemukan bahwa perempuan cenderung lebih tidak menerima penggelapan pajak dibanding laki-laki karena perempuan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berisiko. Namun hasil berbeda diungkapkan oleh Yuliani dan Harjanto (2023) yang menyimpulkan bahwa gender tidak berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor psikologis seperti love of money dan religiusitas lebih dominan dalam mempengaruhi etika Wajib Pajak.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Dari berbagai penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa pengaruh love of money dan religiusitas terhadap etika penggelapan pajak lebih konsisten ditemukan dalam penelitian nasional, sedangkan pengaruh gender bersifat bervariasi. Dengan demikian, penelitian mengenai hubungan ketiga variabel ini penting untuk memperkuat pemahaman tentang perilaku perpajakan masyarakat Indonesia. Dari berbagai penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa pengaruh love of money dan religiusitas terhadap etika penggelapan pajak merupakan temuan yang paling konsisten pada penelitian-penelitian nasional. Sebagian besar studi menunjukkan bahwa orientasi materialistis yang tinggi mendorong individu untuk lebih toleran terhadap praktik penggelapan pajak karena fokus utamanya adalah pada keuntungan pribadi, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Andika, Musmini, dan Wahyuni (2020) yang menegaskan bahwa money ethics dan love of money memiliki hubungan positif dengan persepsi terhadap tax evasion.

Individu dengan tingkat love of money tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengabaikan nilai moral ketika berhadapan dengan kewajiban perpajakan. Sementara itu, aspek religiusitas sering ditemukan sebagai faktor yang memperkuat etika perpajakan karena nilai spiritual dan keimanan seseorang dapat meningkatkan kesadaran moral serta sikap patuh terhadap peraturan. Khairi dan Lestari (2024) menekankan bahwa religiusitas berperan penting dalam membangun moralitas pajak, sehingga individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan ajaran agama.

Berbeda dengan dua variabel tersebut, pengaruh gender terhadap etika penggelapan pajak cenderung bervariasi dan kurang konsisten antar penelitian. Beberapa penelitian menemukan bahwa laki-laki cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi dalam perilaku tidak etis, termasuk penggelapan pajak, dibandingkan perempuan yang lebih berhati-hati dan memiliki sensitivitas etika lebih tinggi. Namun, studi lain tidak menemukan perbedaan berarti antara laki-laki dan perempuan dalam hal etika perpajakan, terutama pada sampel dengan tingkat pendidikan dan pemahaman pajak yang homogen. Hal ini tampak, misalnya, dalam hasil penelitian Putri, Hasanah, dan Handarini (2022) yang menunjukkan bahwa gender bukanlah prediktor yang signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Dengan demikian, ketidakkonsistenan temuan terkait gender mengindikasikan bahwa faktor demografis tersebut tidak selalu menjadi penentu utama dalam perilaku perpajakan, dan dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, maupun karakteristik sampel penelitian.

Secara keseluruhan, penelitian mengenai pengaruh love of money, religiusitas, dan gender masih menjadi topik yang relevan dan penting dalam kajian perilaku perpajakan di Indonesia. Konsistensi temuan pada dua variabel pertama menunjukkan bahwa nilai moral dan orientasi ekonomi memegang peran sentral dalam membentuk etika wajib pajak. Sementara itu, temuan yang beragam pada variabel gender memberikan ruang bagi penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin memoderasi hubungan tersebut, seperti moral pajak, pengalaman perpajakan, kepercayaan kepada otoritas pajak, atau norma sosial masyarakat. Dengan memperdalam pemahaman terhadap ketiga variabel ini, penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan pajak berbasis karakter dan nilai.

3. Metodologi Penelitian

Riset ini menerapkan metode kuantitatif dengan teknik survei guna mengkaji dampak orientasi terhadap uang, tingkat keberagamaan, dan jenis kelamin pada persepsi etis mengenai penggelapan pajak di kalangan wajib pajak perorangan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui distribusi angket berskala Likert kepada para responden yang tercatat sebagai wajib pajak dengan status aktif. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan persyaratan bahwa responden merupakan wajib pajak perorangan yang

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

memiliki rekam jejak dalam menyampakan Surat Pemberitahuan Tahunan. Alat ukur penelitian diverifikasi melalui pengujian validitas dan reliabilitas guna menjamin ketepatan dalam pengukuran.

Analisis data menggunakan teknik regresi berganda yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi kontribusi setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Lebih lanjut, dilakukan serangkaian uji prasyarat statistik mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memvalidasi kesesuaian model regresi yang digunakan. Temuan dari pengolahan statistik selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar penarikan simpulan mengenai keterkaitan antara orientasi terhadap uang, tingkat religiusitas, dan jenis kelamin dengan pandangan etis terhadap praktik penggelapan pajak.Claude dapat membuat kesalahan. Periksa kembali setiap respons.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Nilai Koleras i	Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
Love of Money (x^1)	Item X1.1	0,05	0,000	Valid
	Item X1.2	0,05	0,000	Valid
	Item X1.3	0,05	0,000	Valid
	Item X1.4	0,05	0,000	Valid
	Item X1.5	0,05	0,000	Valid
Religiusitas (x^2)	Item X2.1	0,05	0,000	Valid
	Item X2.2	0,05	0,000	Valid
	Item X2.3	0,05	0,000	Valid
	Item X2.4	0,05	0,000	Valid
	Item X2.5	0,05	0,000	Valid
Gender (X3)	Item X2.1	0,05	0,000	Valid
	Item X2.2	0,05	0,000	Valid
	Item X2.3	0,05	0,000	Valid
	Item X2.4	0,05	0,000	Valid
	Item X2.5	0,05	0,000	Valid
Etika Penggelapan Pajak (y)	Item Y.1	0,05	0,000	Valid
	Item Y.2	0,05	0,000	Valid
	Item Y.3	0,05	0,000	Valid
	Item Y.4	0,05	0,000	Valid
	Item Y.5	0,05	0,000	Valid

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Merujuk pada tabel di atas, terlihat bahwa semua indikator dinyatakan sahih mengingat tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 berada di bawah threshold 0,05, dengan demikian instrumen tersebut dapat diaplikasikan dalam mengukur masing-masing variabel penelitian.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	*Cronbach alpha*	Batas Bawah Alpha	Keterangan
1	*Love Of Money* (X1)	0,812	0,60	Reliabel
2	Religiusitas *(X2)*	0,869	0,60	Reliabel
3	Gender (X3)	0,701	0,60	Reliabel
4	Etika Penggelapan Pajak (Y)	0,884	0,60	Reliabel

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Merujuk pada tabel di atas, keseluruhan indikator pernyataan untuk setiap variabel memperoleh koefisien cronbach alpha lebih besar dari 0,60, dengan demikian semua pertanyaan dalam instrumen penelitian dapat dinyatakan konsisten dan andal.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
Normal Parameters	Mean	0,002
	Std. Deviation	3,842
Test Statistic		0,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Merujuk pada data dalam tabel di atas, diperoleh nilai sig. sebesar 0,200 yang berada di atas threshold 0,05, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sebaran data dalam penelitian ini bersifat normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	Tidak terjadi multikolinearitas
1	Love Of Money (X1)	0,742	1,348	Tidak terjadi multikolinearitas
2	Religiusitas (X2)	0,758	1,319	Tidak terjadi multikolinearitas
3	Gender (X3)	0,821	1,217	Tidak terjadi multikolinearitas

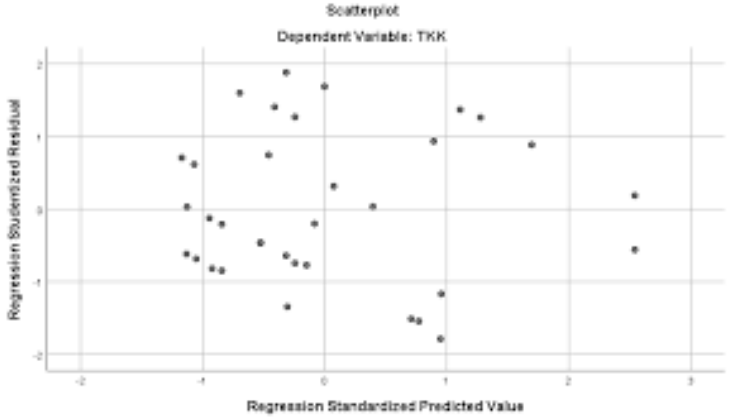
Sumber: Data diolah oleh peneliti,2025

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Merujuk pada tabel di atas, seluruh variabel memperlihatkan angka Tolerance lebih besar dari 0,10, yang menunjukkan tidak adanya hubungan kuat di antara variabel-variabel bebas. Semua variabel juga mencatatkan VIF di bawah angka 10, bahkan tidak mencapai 2, sehingga dipastikan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Dengan demikian, variabel Love of Money, Religiusitas, dan Gender memenuhi syarat untuk diintegrasikan ke dalam model regresi linier berganda.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber:Data diolah peneliti, 2025

Merujuk pada grafik scatterplot untuk pengujian heteroskedastisitas di atas, terlihat jelas bahwa plot residual tersebar tidak beraturan di area sekitar garis horizontal nol tanpa menunjukkan pola sistematis tertentu. Persebaran plot tersebut tidak terstruktur, baik pada sisi positif maupun negatif sumbu horizontal, dan tidak membentuk pola corong (funnel), ekspansi, fluktuasi gelombang, atau linearitas yang biasanya menjadi indikator adanya heteroskedastisitas. Fluktuasi residual juga memperlihatkan tingkat kestabilan yang konsisten sepanjang rentang nilai prediksi standar regresi. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas. Temuan ini menandakan bahwa model regresi yang dibangun sudah sesuai untuk digunakan pada tahapan pengujian lebih lanjut karena varians residual menunjukkan sifat yang homogen dan independen terhadap nilai prediksi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisie Regresi (B)	Sig	Keterangan
Love Of Money (X1)	0,142	0,003	H1 diterima
Religiusitas (X2)	0,498	0,000	H2 diterima
Gender (X3)	0,213	0,002	H3 diterima
Konstanta		25,874	
Nilai Koefisien Determinasi (R^2)		0,911	

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

R Square	0,832
Y	Etika Penggelapan Pajak

Sumber: Data diolah peneliti,2025

Berdasarkan hasil uji analisis linear berganda dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Y= 25,847 + 0,142X1 + 0,498X2 + 0,213X3 + e

Persamaan regresi diatas menunjukkan :

1. Angka konstanta menunjukkan nilai 25,847 yang mengindikasikan bahwa apabila variabel orientasi terhadap uang (X1), tingkat keberagamaan (X2), dan jenis kelamin (X3) tidak memberikan kontribusi apapun, maka persepsi etis terhadap penggelapan pajak (Y) akan berada pada nilai 25,847.
2. Koefisien regresi untuk variabel orientasi terhadap uang (X1) mencapai 0,142, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada variabel orientasi terhadap uang (X1) akan mengakibatkan kenaikan pada persepsi etis terhadap penggelapan pajak (Y) sebesar 0,142, dengan catatan bahwa variabel-variabel lainnya tetap tidak berubah.
3. Koefisien untuk variabel tingkat keberagamaan (X2) bernilai 0,498, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu unit pada tingkat keberagamaan (X2) akan menyebabkan penurunan pada persepsi etis terhadap penggelapan pajak (Y) sebesar 0,498, dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan atau nol.
4. Koefisien variabel jenis kelamin (X3) menunjukkan angka 0,213, yang mengartikan bahwa setiap penambahan satu unit pada variabel jenis kelamin (X3) akan meningkatkan persepsi etis terhadap penggelapan pajak (Y) sebesar 0,213, dengan syarat variabel bebas yang lain tetap atau bernilai nol.

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 6.Hasil Uji T (Uji Parsial)

Variabel	Sig. t	Keterangan
Love Of Money (X1)	0,000	H0 ditotak Ha diterima
Religiusitas (X2)	0,000	H0 ditotak Ha diterima
Gender (X3)	0,000	H0 ditotak Ha diterima

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diuraikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual sebagai berikut:

1. Uji t Variabel *Love Of Money* (X1)
   Temuan analisis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah threshold 0,05, mengindikasikan bahwa variabel orientasi terhadap uang (X1) memiliki dampak signifikan terhadap persepsi etis mengenai penggelapan pajak (Y).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

2. Uji t Variabel Religiusitas (X2)
   Hasil kalkulasi memperlihatkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel tingkat keberagamaan (X2) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi etis mengenai penggelapan pajak (Y).

3. Uji t Variabel Gender (X3)
   Berdasarkan hasil pengolahan data dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel jenis kelamin (X3) berdampak signifikan terhadap persepsi etis mengenai penggelapan pajak (Y).

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 7. Hasil Uji F (Uji Parsial)

Nama Uji	Sig.
Uji F	0,000

Sumber : Data diolah peneliti,2025

Merujuk pada data tabel tersebut, terlihat bahwa hasil uji menampilkan nilai sig. F sejumlah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Love Of Money (X1), Religiusitas (X2), dan Gender (X3) memiliki dampak secara kolektif terhadap Etika Penggelapan Pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square
0,948	0,822	0,845

Sumber : Data diolah peneliti,2025

Merujuk pada tabel di atas, diperoleh nilai R^2 sebesar 0,822 atau 82,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Love Of Money (X1), Religiusitas (X2), dan Gender (X3) secara simultan mampu menjelaskan variasi pada Etika Penggelapan Pajak (Y) sebesar 82,2%, sedangkan 17,8% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika penggelapan pajak merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh aspek psikologis, nilai internal, serta karakteristik sosial yang melekat pada wajib pajak. Dalam konteks ini, tiga variabel utama—love of money, religiusitas, dan gender—terbukti memiliki peranan penting dalam memengaruhi cara individu memahami, menilai, dan mengambil keputusan terkait perilaku yang berpotensi melanggar kewajiban perpajakan. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa perilaku etis tidak muncul hanya karena adanya regulasi atau ancaman sanksi, tetapi berakar pada bagaimana individu memaknai uang, nilai moral yang dianutnya, serta identitas sosial yang memengaruhi preferensi risiko dan orientasi etisnya. Dengan demikian, penggelapan pajak tidak semata-mata dapat dipahami sebagai tindakan ekonomi rasional, melainkan juga sebagai cerminan karakter dan nilai yang bersumber dari diri wajib pajak.

Variabel pertama, yaitu love of money, terbukti menjadi salah satu faktor kuat yang memengaruhi rendahnya etika terhadap tindakan penggelapan pajak. Individu dengan tingkat love of money tinggi cenderung memandang uang sebagai simbol kesuksesan, kekuasaan, dan sumber kebahagiaan, sehingga mereka lebih berorientasi untuk memaksimalkan kekayaan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

pribadinya. Dalam perspektif teori psikologi moral, individu semacam ini sering menggunakan mekanisme moral disengagement, yaitu strategi kognitif untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan norma, seperti tax evasion. Mereka mungkin merasa bahwa pajak terlalu membebani, pemerintah tidak efisien, atau uang mereka lebih berguna jika dikelola sendiri. Justifikasi semacam ini membuat perilaku penggelapan pajak tampak sebagai tindakan logis dan tidak terlalu salah secara moral. Selain itu, orientasi materialistik yang tinggi dapat menggeser nilai altruistik dan tanggung jawab sosial, sehingga kontribusi pajak yang seharusnya menjadi kewajiban bersama justru dipandang sebagai pengurangan terhadap kekayaan pribadi. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana love of money bukan hanya menggoyahkan integritas moral individu, tetapi juga dapat membentuk pola pemikiran yang memperlemah kepekaan etis terhadap kewajiban sebagai warga negara.

Di sisi lain, religiusitas memberikan pengaruh yang berlawanan dan berfungsi sebagai faktor protektif terhadap perilaku tidak etis dalam penggelapan pajak. Individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi biasanya menjadikan ajaran agama sebagai panduan dalam bertindak, termasuk dalam urusan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Ajaran agama umumnya menekankan nilai kejujuran, amanah, larangan mengambil hak orang lain, serta pentingnya memberikan kontribusi bagi kebaikan bersama. Karena pajak merupakan sumber pendanaan bagi pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial, maka penggelapan pajak dapat dipandang sebagai tindakan yang melanggar nilai moral dan etika keagamaan. Individu yang religius bukan hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga aspek spiritual, seperti keberkahan rezeki dan tanggung jawab moral kepada Tuhan. Hal ini membuat mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan cenderung menghindari tindakan yang memiliki konsekuensi moral negatif. Pada tingkat tertentu, religiusitas dapat pula menjadi kontrol internal yang lebih efektif daripada sanksi formal, karena berhubungan dengan keyakinan bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan negara tetapi juga di hadapan Tuhan. Dengan demikian, religiusitas berperan sebagai elemen penting dalam menumbuhkan budaya perpajakan yang etis dan berkeadilan.

Selanjutnya, variabel gender juga memberikan dinamika tersendiri terhadap perilaku etika penggelapan pajak. Berbagai studi sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan dalam hal sensitivitas moral, preferensi risiko, dan kecenderungan melakukan tindakan yang berpotensi melanggar norma. Perempuan, secara umum, memiliki tingkat kepatuhan hukum dan moralitas yang lebih tinggi, serta lebih menghindari risiko dibandingkan laki-laki. Perempuan biasanya memiliki tingkat empati dan pertimbangan etis yang lebih kuat, sehingga lebih cenderung memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang salah dan merugikan masyarakat. Sementara itu, laki-laki cenderung lebih rasional dalam melihat peluang, lebih tertarik pada hasil finansial, dan lebih berani mengambil risiko, sehingga lebih besar kemungkinannya untuk melihat tax evasion sebagai strategi penghematan atau efisiensi finansial. Meskipun demikian, pengaruh gender ini tidak berdiri sendiri, melainkan dapat berinteraksi dengan variabel lainnya seperti love of money dan religiusitas. Misalnya, laki-laki dengan love of money tinggi lebih rentan terhadap perilaku penggelapan pajak, sedangkan perempuan dengan religiusitas tinggi cenderung memiliki etika perpajakan yang sangat kuat. Dengan demikian, gender memberikan kerangka sosial-psikologis yang memoderasi bagaimana nilai-nilai moral dan orientasi materialistik diterjemahkan dalam keputusan perpajakan.

Ketika ketiga variabel ini dianalisis secara simultan, terlihat bahwa perilaku etis dalam perpajakan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara orientasi pribadi (love of money), sistem nilai (religiusitas), dan karakteristik sosial (gender). Love of money mendorong orientasi individualistik, religiusitas meningkatkan orientasi moral, sedangkan gender membentuk arah

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

dan kekuatan keputusan etis yang berkaitan dengan pajak. Dengan demikian, perilaku penggelapan pajak tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu variabel ekonomi atau hukum, tetapi membutuhkan pemahaman holistik yang mencakup aspek psikologis, moral, dan sosial. Temuan ini juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan penggelapan pajak harus bersifat multidimensi—tidak hanya meningkatkan pengawasan atau sanksi, tetapi juga memperkuat pendidikan etika, nilai keagamaan, serta menyesuaikan strategi kampanye kepatuhan pajak dengan karakteristik gender dan orientasi individu.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pemerintah dan lembaga perpajakan. Untuk menekan praktik penggelapan pajak, otoritas pajak dapat mengembangkan program penyadaran moral yang menekankan hubungan antara pajak dan kesejahteraan masyarakat. Kampanye berbasis nilai-nilai religius dapat menjadi salah satu pendekatan efektif, mengingat kuatnya pengaruh religiusitas terhadap etika perpajakan. Di sisi lain, strategi komunikasi yang menekankan integritas, tanggung jawab sosial, dan dampak positif pajak dapat membantu mengurangi pengaruh love of money yang mendorong perilaku negatif. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap perbedaan gender dapat membantu pemerintah merancang strategi sosialisasi perpajakan yang lebih tepat sasaran, misalnya melalui pendekatan yang lebih persuasif dan emosional kepada perempuan, serta pendekatan rasional dan berbasis manfaat kepada laki-laki. Dengan memadukan pendekatan ini, sistem perpajakan dapat menjadi lebih efektif, lebih diterima oleh masyarakat, dan lebih tahan terhadap praktik penggelapan pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa penggelapan pajak bukan hanya masalah ekonomi atau hukum, tetapi merupakan isu etika yang sangat dipengaruhi oleh faktor internal individu. Love of money menjadi pendorong utama tindakan penggelapan pajak, sementara religiusitas menjadi benteng moral yang menahan perilaku menyimpang. Gender, di sisi lain, memberikan perbedaan signifikan dalam sensitivitas moral dan pengambilan keputusan. Ketiga variabel ini saling berinteraksi secara kompleks dan memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana etika perpajakan terbentuk. Dengan memahami dinamika ini, pemerintah dapat membangun strategi kepatuhan pajak yang lebih manusiawi, berorientasi pada nilai, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat. Strategi ini pada akhirnya akan membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, serta mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, pemahaman terhadap pengaruh love of money, religiusitas, dan gender juga memberikan kontribusi penting dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap karakteristik psikologis dan sosial masyarakat. Ketika pemerintah menyadari bahwa faktor internal seperti orientasi materialistik dapat melemahkan etika perpajakan, maka strategi peningkatan kepatuhan tidak dapat hanya bertumpu pada pengawasan dan sanksi, tetapi juga harus menyasar aspek pembentukan karakter dan nilai. Kampanye edukasi publik dapat dirancang untuk memperkuat kesadaran bahwa pajak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk kontribusi moral untuk mendukung layanan publik, mengurangi ketimpangan, dan membangun masa depan bangsa. Sebaliknya, nilai religiusitas yang terbukti memperkuat etika perpajakan dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi melalui pendekatan berbasis komunitas keagamaan, ceramah, atau kegiatan sosial yang menekankan pentingnya amanah dan tanggung jawab kepada negara. Pendekatan ini dapat menjadi strategi yang lebih efektif karena menyentuh aspek keyakinan dan nilai spiritual yang memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku individu.

Di sisi lain, pemahaman mengenai perbedaan perilaku perpajakan berdasarkan gender memberikan peluang bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan

berbasis kebutuhan sosial. Perempuan, yang umumnya lebih sensitif terhadap norma moral dan sosial, dapat dijadikan agen perubahan dalam memperkuat budaya kepatuhan pajak melalui program edukasi dan kampanye literasi fiskal yang lebih terstruktur. Sementara itu, untuk laki-laki yang cenderung lebih berorientasi pada rasionalitas dan pengambilan risiko, kampanye yang menekankan manfaat ekonomi jangka panjang dari kepatuhan pajak serta konsekuensi hukum yang lebih tegas dapat memberikan efek yang lebih signifikan. Dengan demikian, strategi berbasis gender bukan dimaksudkan untuk membedakan perlakuan, tetapi untuk mengoptimalkan pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik psikologis masing-masing kelompok.

Interaksi ketiga variabel ini juga memperlihatkan bahwa perilaku penggelapan pajak tidak dapat dilihat sebagai fenomena yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika masyarakat merasa bahwa pajak dikelola dengan buruk, tidak transparan, atau tidak memberi manfaat nyata bagi mereka, maka love of money dapat semakin memperkuat kecenderungan penggelapan pajak. Sebaliknya, religiusitas dan nilai moral tidak akan cukup kuat menahan perilaku menyimpang apabila negara gagal menunjukkan akuntabilitas dan keadilan dalam pengelolaan fiskal. Oleh karena itu, peningkatan etika perpajakan membutuhkan sinergi antara perubahan perilaku individu dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Transparansi penggunaan anggaran, pemberantasan korupsi, serta penyediaan layanan publik yang berkualitas merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela.

Hasil penelitian ini juga menekankan bahwa membangun ekosistem perpajakan yang etis memerlukan pendekatan multidimensional yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi nilai integritas, penguatan lembaga keagamaan sebagai agen perubahan moral, serta pemanfaatan teknologi untuk mengurangi peluang praktik kecurangan merupakan komponen penting dalam strategi jangka panjang. Transformasi digital dalam sistem perpajakan seperti penggunaan e-filing, integrasi data kependudukan, dan pemantauan transaksi digital dapat menurunkan celah untuk melakukan penggelapan pajak, sekaligus menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien. Ketika mekanisme pengawasan berbasis teknologi dipadukan dengan edukasi moral yang kuat, maka budaya kepatuhan akan terbentuk tidak hanya secara struktural, tetapi juga secara internal dalam diri wajib pajak.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengungkap hubungan antarvariabel, tetapi juga memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku perpajakan dalam masyarakat Indonesia. Pemahaman ini sangat penting sebagai dasar bagi pemerintah, pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi perpajakan dalam merancang pendekatan baru yang tidak hanya menekankan aspek regulatif, tetapi juga membangun kesadaran etis dan tanggung jawab kolektif. Pada akhirnya, keberhasilan peningkatan etika perpajakan akan menciptakan sistem fiskal yang lebih sehat, memperkuat perekonomian nasional, dan memastikan bahwa pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan literatur mengenai perilaku perpajakan di negara berkembang, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan religius yang unik. Dalam lingkungan masyarakat yang secara umum memiliki tingkat religiusitas tinggi namun sekaligus menghadapi dinamika ekonomi yang menuntut, fenomena love of money sering kali muncul sebagai bentuk respons atas tekanan finansial, gaya hidup modern, atau persepsi mengenai ketidakadilan ekonomi. Ketika orientasi materialisme mendominasi, individu dapat menganggap praktik penggelapan pajak sebagai sesuatu yang “wajar” atau “tidak merugikan secara langsung”, sehingga aspek moral kerap diabaikan. Hal

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

inilah yang menjadikan love of money sebagai determinan penting dalam analisis perilaku tidak etis di bidang perpajakan.

Sebaliknya, religiusitas terbukti menjadi faktor protektif yang signifikan dalam membentuk perilaku etis. Individu dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung menempatkan nilai moral, integritas, dan tanggung jawab sosial sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan teori perilaku etis yang menyatakan bahwa nilai-nilai spiritual dan keyakinan religius dapat memperkuat mekanisme pengendalian internal (internal control) serta meningkatkan persepsi mengenai pentingnya kontribusi kepada negara melalui pajak. Dalam masyarakat Indonesia, religiusitas bahkan tidak hanya bersifat personal, tetapi juga kolektif, sehingga norma sosial yang terbentuk melalui komunitas keagamaan dapat menjadi kekuatan besar dalam menekan praktik-praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kampanye kepatuhan pajak tidak cukup hanya mengandalkan sanksi, tetapi perlu memasukkan pendekatan nilai dan moral yang relevan dengan konteks sosial masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa perilaku penggelapan pajak tidak dapat dipandang sebagai fenomena yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor psikologis, sosial, moral, serta persepsi terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Banyak wajib pajak yang secara kognitif memahami kewajiban perpajakan, namun secara afektif belum memiliki keterikatan dan rasa tanggung jawab untuk mematuhinya. Ketika sistem perpajakan dianggap rumit, tidak adil, atau kurang transparan, sebagian individu akan lebih mudah terpengaruh oleh nilai materialistik sehingga menghalalkan cara-cara yang menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, peningkatan etika perpajakan tidak hanya bergantung pada karakteristik individu, tetapi juga pada kualitas tata kelola pemerintah, transparansi anggaran, dan efektivitas institusi perpajakan dalam membangun kepercayaan publik. Implikasi praktis dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya strategi berlapis dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Pemerintah dapat memanfaatkan temuan tentang love of money untuk merancang edukasi dan kampanye publik yang menyoroti konsekuensi jangka panjang dari perilaku tidak etis, baik bagi individu maupun negara. Misalnya, menekankan bahwa penggelapan pajak dapat menghambat pembangunan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, hingga layanan sosial yang pada akhirnya juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, temuan mengenai peran religiusitas dapat dimanfaatkan dalam bentuk kolaborasi dengan lembaga keagamaan, tokoh agama, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat pesan moral mengenai pentingnya membayar pajak sebagai bentuk ibadah, amanah, atau kontribusi sosial.

Dalam konteks akademik, hasil penelitian ini mendorong pengembangan kajian interdisipliner yang menghubungkan aspek psikologi keuangan, perilaku organisasi, ekonomi perilaku, dan studi moral keagamaan untuk memahami lebih komprehensif dinamika kepatuhan pajak. Penelitian lanjutan dapat menggali lebih dalam mengenai bagaimana faktor sosial—seperti norma kelompok, pengaruh keluarga, lingkungan kerja, dan peran komunitas—mempengaruhi persepsi individu terhadap etika perpajakan. Selain itu, penting pula untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi, digitalisasi sistem pajak, serta rendahnya literasi keuangan dapat menjadi variabel moderasi dalam hubungan antara nilai materialisme, religiusitas, dan perilaku perpajakan di era modern. Secara keseluruhan, pembahasan ini memperjelas bahwa peningkatan etika penggelapan pajak di Indonesia membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan dimensi psikologis, moral, sosial, dan institusional. Penelitian ini memberikan landasan kuat bagi berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan dan strategi intervensi yang lebih efektif, tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pembangunan karakter dan kesadaran etis masyarakat. Dengan demikian,

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

diharapkan terwujud budaya perpajakan yang sehat, kepatuhan yang lebih tinggi, serta sistem fiskal yang mampu mendukung pembangunan nasional secara adil dan berkelanjutan.

Namun, upaya mencapai kondisi ideal tersebut tentu memerlukan proses panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, otoritas perpajakan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, pelaku usaha, hingga masyarakat umum. Perubahan perilaku perpajakan bukan hanya persoalan administratif, tetapi turut menyangkut transformasi nilai, persepsi, dan kesadaran kolektif tentang pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara.

Dalam konteks kebijakan publik, hasil penelitian ini memberikan sinyal kuat bahwa strategi kepatuhan pajak perlu memadukan pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural terkait dengan perbaikan sistem perpajakan, seperti penyederhanaan proses administrasi, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, serta penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Sistem yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit akan mengurangi godaan untuk menghindari atau menggelapkan pajak, terutama bagi individu yang secara emosional cenderung mempertimbangkan keuntungan pribadi. Sementara itu, pendekatan kultural berkaitan dengan upaya membentuk nilai dan norma sosial yang mendukung perilaku taat pajak. Ini mencakup penginternalisasian konsep bahwa membayar pajak merupakan tindakan moral, kontribusi sosial, dan bagian dari etika warga negara yang bertanggung jawab. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kaya akan nilai-nilai religius, temuan mengenai pengaruh signifikan religiusitas memberi peluang besar bagi pemerintah untuk berkolaborasi dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan. Melalui pendekatan nilai dan ajaran moral, pesan tentang pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dapat disampaikan dengan cara yang lebih persuasif dan mudah diterima oleh masyarakat. Penguatan aspek moral ini dapat menjadi benteng yang efektif dalam menahan dorongan materialistik atau *love of money* yang sering kali menjadi pemicu terjadinya tindakan tidak etis di bidang perpajakan.

Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran bahwa perilaku penggelapan pajak tidak hanya terjadi karena faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap integritas pemerintah. Jika masyarakat menilai bahwa dana publik tidak dikelola dengan baik atau terjadi penyelewengan anggaran, maka tingkat kepercayaan dan kemauan mereka untuk membayar pajak dapat menurun. Oleh karena itu, transparansi dalam penggunaan APBN dan APBD, pemberantasan korupsi, serta penguatan tata kelola pemerintahan merupakan langkah krusial yang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun etika perpajakan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, semakin besar pula potensi terciptanya budaya perpajakan yang sehat.

Di sisi lain, studi ini juga membuka ruang untuk mempertimbangkan pendekatan perilaku (behavioral approach) dalam kebijakan kepatuhan pajak. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami motivasi psikologis wajib pajak, termasuk bagaimana mereka mengambil keputusan, persepsi risiko, dan pertimbangan moral. Misalnya, pemberian *nudges* atau dorongan halus berupa pesan moral, perbandingan sosial, atau pengingat berkala dapat meningkatkan motivasi internal untuk patuh pajak tanpa harus mengandalkan ancaman sanksi. Strategi seperti ini telah digunakan di berbagai negara dan terbukti efektif, terutama di negara berkembang yang menghadapi masalah kepatuhan serupa. atemuan penelitian ini menjadi dasar bagi akademisi untuk terus mengembangkan teori-teori yang menghubungkan aspek ekonomi perilaku, psikologi moral, dan studi religius dalam ranah perpajakan. Konsep *love of money*, misalnya, dapat diperluas melalui analisis mengenai tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, dan budaya materialistik di masyarakat modern. Demikian pula, religiusitas dapat

dikaji lebih lanjut dengan mengidentifikasi dimensi religius yang paling berperan dalam membentuk etika perpajakan, seperti keyakinan, praktik ibadah, pengalaman spiritual, dan norma komunitas. Penelitian lanjutan juga dapat mempertimbangkan faktor moderasi seperti literasi keuangan, tingkat pendidikan, atau akses informasi dalam mempengaruhi hubungan antarvariabel.

Pada akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa membangun etika perpajakan yang kuat bukan hanya soal menanamkan kepatuhan, tetapi sekaligus membentuk karakter bangsa. Perilaku perpajakan mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami perannya sebagai bagian dari negara dan sejauh mana mereka merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung pembangunan nasional. Ketika nilai-nilai etis, spiritual, dan solidaritas sosial menjadi landasan perilaku, maka upaya untuk menciptakan masyarakat yang taat pajak akan semakin mudah dicapai. Dengan adanya sinergi antara aspek moral, psikologis, kebijakan, dan tata kelola pemerintahan, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat sistem fiskalnya. Sistem fiskal yang kuat bukan hanya menopang pembangunan, tetapi juga menciptakan pemerataan kesejahteraan, memperkuat stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, temuan penelitian ini layak dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan untuk merancang strategi kebijakan perpajakan yang tidak hanya fokus pada regulasi, tetapi juga menyentuh aspek nilai dan kemanusiaan yang menjadi dasar perilaku individu dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Wijayanti, A. (2020). Pengaruh Love of Money dan Machiavellian Terhadap Tax Evasion. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan.
[2] Sari, D., & Putra, A. (2021). Love of Money, Machiavellian, dan Persepsi Etis terhadap Tax Evasion. Jurnal Akuntansi Multiparadigma.
[3] Rahmawati, D. (2019). Pengaruh Religiusitas dan Moralitas terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi.
[4] Hasanah, R., & Kurniawan, B. (2020). Religiusitas, Kesadaran Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Pajak Indonesia.
[5] Lestari, F. (2022). Religiusitas dan Persepsi atas Etika Penggelapan Pajak di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam.
[6] Pratiwi, N. (2021). Pengaruh Gender dan Moralitas terhadap Persepsi Etika Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi dan Bisnis.
[7] Yuliani, S., & Harjanto, R. (2023). Gender, Religiusitas, dan Persepsi Etis atas Tax Evasion. Jurnal Riset Akuntansi Nasional.
[8] Wibowo, B. (2020). Etika, Kepatuhan Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak. Jurnal Riset Perpajakan.
[9] Hidayat, M. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Penggelapan Pajak di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik.
[10] Andika, S., Musmini, L. S., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh money ethics, etika wajib pajak, religiusitas intrinsik dan ekstrinsik serta tax morale terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion (Studi pada WPOP di KPP Pratama Singaraja). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi).
[11] Khairi, E. N., & Lestari, T. U. (2024). Pengaruh religiusitas, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kuningan. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia.
[12] Putri, A., Hasanah, N., & Handarini, D. (2022). Pengaruh religiusitas, moral pajak, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak pada pelaku usaha online di Jakarta Timur. SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam.